

UPAYA LOBBY HIMPUNAN MAHASIWA ISLAM KEPADA PRESIDEN SOEKARNO PADA TAHUN 1965

Wiwid Ferdiawan, M Basri, Syaiful M

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947, faximile (0721) 704 624

Email : Ferdiawanwiwid@gmail.com

HP : 085840991216

Formulation of the problem in this research was what were the underlying factors of Islamic Students Association (HMI) made lobbying effort to the President on the dissolution of PKI in 1965. The aimed of this research was to determine the underlying factors of Islamic Students Association (HMI) made lobbying efforts to the President in the dissolution of PKI in 1965. Data collection techniques used were through literature and documentation techniques. The method used was historical method. The data analysis technique used in this research was qualitative techniques. The result showed that the factors that affected lobbying efforts of HMI to President Soekarno influenced by internal and external factors of organization. Internal factors of HMI that affected lobbying efforts against President Sukarno namely; the doctrine of HMI Struggle, the Plenary Meeting of PB HMI and the role of HMI Senior Prominent in the cabinet. The external factors namely; The support of Army leaders to HMI, attitude of the President to the PKI and PKI efforts to disperse the HMI.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang melatarbelakangi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno dalam pembubaran PKI pada tahun 1965. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik kepustakaan dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil pengumpulan data, faktor-faktor yang mempengaruhi upaya lobby HMI kepada Presiden Soekarno dipengaruhi oleh faktor internal organisasi serta faktor eksternal. Faktor Internal HMI yang mempengaruhi upaya lobby terhadap Presiden Soekarno yakni; Doktrin Perjuangan HMI, Rapat Pleno PB HMI, dan Peran Tokoh Senior HMI dalam kabinet. Sedangkan faktor eksternal yakni; Dukungan tokoh petinggi Angkatan Darat (AD) kepada HMI, Sikap Presiden Soekarno terhadap PKI, dan upaya-upaya PKI untuk membubarkan HMI.

Kata kunci : faktor-faktor, HMI, presiden soekarno

PENDAHULUAN

PKI merupakan sebuah Partai yang berhaluan Marxisme-Lenisme(Komunis). Partai Komunis Indonesia merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan RRC. Pada Tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun pimpinan Muso dan Amir Syarifudin. Wakil Ketua PB HMI Achmad Tirtosudiro bersama dengan Hartono dan Amir Amalsyah membentuk Corp Mahasiswa (CM). Di samping sebagai kekuatan tempur, Corp Mahasiswa juga bertugas memasang ranjau, intelejen, penerangan, bersama-sama dalam Kesatuan Siliwangi dari Jawa Barat.

Pada era 1950-an dan 1960-an dinamika politik Indonesia dipenuhi dengan gejolak. Praktek pergantian sistem pemerintahan sangat sekali terasa, penulis beranggapan bahwa hal ini untuk mengetahui formula yang ideal dalam menentukan arah sistem pemerintahan di Indonesia. Kabinet-kabinet pemerintahan jatuh bangun dalam waktu yang singkat.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan eksperimen politik dengan menerapkan politik NASAKOM. Sistem politik NASAKOM dianggap sebagai cara yang ampuh untuk mempersatukan golongan Nasionalis, Agama, dan Komunis. Berkat perlindungan Soekarno PKI memperoleh tempat eksklusif dalam eksperimen politik NASAKOM (Rex Mortimer, 2011: 3).

Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh dukungan oleh kondisi ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan

adanya nasakomisasi tersebut, PKI menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden Soekarno dan Angkatan Darat.

Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan yang disebut "aksi sepihak". Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khusus, mulai meletakkan siasat – siasat untuk melawan komando puncak AD.

Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah.

Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah.

Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang

menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru Revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.

Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat menteri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).

Pada situasi lain, di saat-saat menjelang terjadinya G 30 S/PKI, pada tanggal 13 September 1965, DN. Aidit sebagai Ketua CC PKI di anugerahi bintang Mahaputra oleh Presiden Soekarno di Istana Negara, pada saat yang sama pula Generasi Muda Islam menunjukkan solidaritas pembelaan terhadap HMI. Pada penutupan Kongres ke III CGMI tanggal 29 September 1965, DN. Aidit menghasut massa CGMI supaya meminta kepada Bung Karno untuk membubarkan HMI (Agussalim Sitompul, 2008;47).

Menurut PKI golongan agama dianggap paling gigih menentang PKI. Rakyat harus terus menerus dipengaruhi agar benar-benar membenci dan tidak percaya kepada agama. HMI dituduh anti Pancasila, anti Bung Karno, antek DI/TII, HMI terlibat PRRI, HMI terlibat dalam usaha pembunuhan Bung Karno di berbagai pihak serta fitnah lain yang

setiap kali bermunculan dengan tujuan untuk membubarkan HMI (Agussalim Sitompul;46).

Gerakan massa mahasiswa yang tergabung dalam Generasi Muda Islam pada tanggal 13 September 1965 menunjukkan solidaritas pembelaan terhadap HMI dengan melakukan demonstrasi, mereka menunjukkan solidaritas pembelaan terhadap HMI, dan menyatakan *akan mempertahankan HMI sampai titik darah penghabisan* (Agussalim Sitompul, 2008;47).

Pada saat Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia (PPMI) telah disusupi oleh PKI, dan ada indikasi terlibat Gestapu/PKI, HMI mengambil peran dalam upaya perjuangan melawan PKI. Langkah serta berbagai upaya dilakukan HMI dalam upaya pembubaran PKI.

Pasca G 30 S/PKI PB HMI menyambut ajakan Bung Karno untuk berkunjung ke Istana Bogor. PB HMI berpandangan bahwa Ideologi Komunis tidak sesuai dengan jiwa kepribadian Bangsa Indonesia. Pada saat menilai kebrutalan PKI, HMI menyebutkan bahwa gerakan tersebut adalah gerakan anti Pancasila dan UUD 1945. Upaya lobby-lobby politik yang dilakukan HMI kepada Presiden Soekarno merupakan satu hal gerakan politik sebagai suatu cara dalam mempengaruhi Presiden Soekarno untuk menentukan suatu sikap politik terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh PKI.

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani : *methodos* yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang

diperlukan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan masalah (Joko Subagyo, 2006:1).

Metode penelitian adalah suatu cara untuk dapat memecahkan suatu permasalahan dengan cara menggunakan prosedur serta sistematika nya sendiri. Metode penelitian historis adalah metode untuk membuat rekontruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan mengevaluasi, memverifikasikan, sertamensitesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Sumadi Suryabrata, 2012:73).

Menurut Jack. R. Fraenkel & Norman E. Wallen, 1990 : 411 dalam Yatim Riyanto, 1996: 22 dalam Nurul Zuriah, 2005: 51; Penelitian sejarah adalah penelitian yang secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Penelitian ini mencoba merenkonstruksi apa yang terjadi pada masa yang lalu selengkap dan seakurat mungkin, dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Dalam mencari data dilakukan secara sistematis agar mampu menggambarkan, menjelaskan, dan memahami kegiatan atau peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. ([http://www.metodologi penelitian sejarah.go.id](http://www.metodologi_penelitian_sejarah.go.id)).

Metode historis adalah suatu cara dalam proses mengumpulkan, menganalisa, dan memahami data-data sejarah, ditelaah secara kritis untuk dijadikan bahan dalam penulisan sejarah sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan secara tepat.

“Menurut pendapat F.N Kerlinger, Variabel adalah sebuah

konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran(F.N Kerlinger dalam Suharsimi Arikunto,1998; 97). Menurut Pendapat Surisno Hadi bahwa Variabel sebagai gejala yang bervariasi misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin mempunyai variasi: laki-laki-perempuan, berat badan, karena ada berat badan 40 kg, 50 kg dan sebagainya. Gejala adalah objek penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (Sutrisno Hadi dalam Suharsimi Arikunto, 1998; 97).

Sugiyono menyatakan bahwa variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain(Sugiyono dalam Husein Umar, 2011:47).

Variabel penelitian adalah sebuah objek yang mempunyai nilai dan menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada faktor-faktor yang mendorong Himpunan Mahasiswa Islam melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno tentang pembubaran PKI pada tahun 1965. Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan dan dokumentasi.

Menurut Irawati Singarimbun (dalam Joko Subagyo, 2006: 116) Teknik Kepustakaan dengan cara memanfaatkan perpustakaan berarti melakukan penelitian/ penelusuran kepustakaan dan menelahnya. Menurut Mestika Zed ada empat langkah dalam riset kepustakaan, yakni; *Langkah Pertama* ;

menyiapkan alat perlengkapan, *Langkah Kedua*; menyusun bibliografi kerja, *Langkah Ketiga*; mengatur waktu, *Langkah Keempat*; membaca dan membuat catatan penelitian.

Teknik kepustakaan adalah cara mengumpulkan/memperoleh data dengan cara melibatkan perpustakaan sebagai sumber untuk memperoleh data dengan tujuan untuk menggali teori-teori, konsep, serta data yang pernah diteliti sebelumnya oleh para ahli.

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 188) “dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, surat kabar, agenda, dan sebagainya”.

Menurut peneliti sendiri teknik dokumentasi sangat sekali diperlukan dalam memperkuat data suatu objek penelitian. Dengan menggunakan teknik dokumentasi peneliti berusaha untuk mengumpulkan buku-buku, surat kabar, dan film dokumenter tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi Himpunan Mahasiswa Islam melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno tentang pembubaran PKI pada tahun 1965.

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa di atas inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian (Joko Subagyo, 2006; 106).

Data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan demikian teknik analisis data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan

kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam jangka waktu empat tahun sejak tahun 1960, PKI telah berhasil menguasai sebagian besar aparatur pemerintahan. Manipol-Usdek lahir pada tahun 1960. NASAKOM dicetuskan di Istana Tampak Siring, Bali. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kekuatan-kekuatan politik yang menonjol ke pentas nasional direpresentasikan oleh kekuatan-kekuatan politik NASAKOM.

PKI menanjak dalam kekuatan dan pengaruh tertingginya di paruh pertama 1960-an. Sebuah periode yang di Indonesia di dominasi oleh figur kharismatik Presiden Soekarno dan dalam perlindungannya, PKI menjadi partai komunis bukan pemerintah yang terbesar di dunia, dan banyak orang di luar dan dalam Indonesiayakin periode tersebut akan menjadi batu pijak bagi langkah mereka selanjutnya; Membentuk Negara Komunis (Rex Mortimer, 2011:3)

Di samping itu, PKI memantapkan situasi dikalangan anggota-anggotanya dan masa rakyat. Semua ini dimungkinkan karena PKI memanfaatkan kepemimpinan dan berhasil mempengaruhi Presiden Soekarno dengan berbagai aspek politiknya seperti MANIPOL, USDEK, NASAKOM, dan lain-lain.

Setelah persiapan untuk melakukan pemberontakan mereka anggap cukup matang antara lain dengan latihan kemiliteran para

sukarelawan dan ormas-ormas PKI di Lubang Buaya. Rapat terakhir pimpinan G 30 S/PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965.

Dari lubang buaya ini PKI dan pasukan-pasukan yang telah dipersiapkan, melancarkan gerakan pemberontakan, dengan diawali lebih dahulu menculik dan membunuh secara keji pemimpin-pemimpin TNI AD, menduduki instalasi vital di ibukota seperti studio RRI, pusat Telkom, dan lain-lain. Pembunuhan terhadap para Jenderal TNI Angkatan darat dilakukan di Lubang Buaya.

Sementara itu dari segi nasional aplikasi konsepsi NASAKOM mulai memberi kesempatan ke arah terganggunya keseimbangan kekuatan politik. Hal ini disebabkan karena secara kualitatif Ormas/Orpol terutama yang menjadi anggota poros NASAKOM berbeda, baik kualitatif, kerapihan organisasi maupun kualitatif militansi dan sebagainya. Sedikit demi sedikit PKI mengambil inisiatif kearah mendominasi isu-isu politik. Konsepsi NASAKOM tampak semakin mewarnai kehidupan politik. Khusus mengenai HMI, terjadilah keguncangan baik intern maupun ekstern umat Islam.

Dalam melanjutkan survival perjuangan politik, pasca pemberontakan G 30 S/PKI, HMI mencoba terobosan dalam melakukan manuver-manuver politiknya. Melihat situasi dinamika organisasi mahasiswa yang terindikasi terlibat Gestapu/PKI, Pengurus Besar HMI (PB HMI) atas inisiatif Wakil Ketua PB HMI Mar'ie Muhammad memprakarsai berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) (Alfan Alfian, 2013; 87).

KAMI merupakan organisasi sayap dari HMI. Tujuan membentuk KAMI berkaca pada pengalaman pada penumpasan PKI Madiun tahun 1948. Pasca pemberontakan PKI Madiun, PKI dendam kepada HMI karena terlibat dalam penumpasan PKI Madiun bersama ABRI. Pada pemberontakan PKI Madiun HMI secara terang-terangan menunjukkan identitas organisasi. Dampak dari peristiwa tersebut nampak sangat sekali terasa ketika PKI gencar dan ingin mengganyang serta membubarkan HMI.

KAMI dilahirkan dari rahim HMI. KAMI berdiri tanggal 25 Oktober 1965, dibubarkan pada tanggal 25 Februari 1966. Tepat Cuma empat bulan usia formal organisasi itu. Aksi-aksi dimulai tanggal 10 Januari 1966. Hasil gemilang dicapai tanggal 11 Maret 1966. Inilah periode Masa Aksi, yang disebutkan "*60 Hari Mengguncangkan Indonesia*".

Pada Oktober 1965, PB HMI mengeluarkan pernyataan resmi tatkala Ekky Syahrudin dan Darmin P. Siregar atas nama PB HMI menemui Panglima Mayjen Wirahadikusumah di markas Kodam V Jaya yang isinya selain menyatakan dukungan kepada Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi, HMI juga menyatakan bahwa Gerakan 30 September adalah kontrarevolusi. PKI harus diganyang sampai akar-akarnya. Bagi HMI sudah jelas sikapnya terhadap peristiwa G 30 S/PKI, sebagai suatu peristiwa makar PKI terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu PB HMI juga mencermati aspek psikologi Bung Karno, yang sangat merindukan anak

muda yang dinamis dan revolusioner. HMI juga menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan yang progresif dan revolusioner, serta konsisten terhadap sikapnya sebagai kader umat dan kader bangsa. HMI mendukung serta melibatkan diri dalam upaya mengganyang Malaysia. Antara lain dengan membentuk sukarelawan Dwikora. Ketua Umum serta Pengurus Besar HMI yang lain juga mengikuti latihan militer, dan siap untuk diberangkatkan ke garis depan.

Untuk mencapai misi yang diemban, HMI memiliki doktrin perjuangan yang mampu membangkitkan pola pikir kader dalam mencapai arah tujuannya. Sebagai organisasi pengkaderan tentunya HMI mempunyai suatu doktrin dalam membentuk militansi kadernya serta rasa cinta kepada organisasi. Hal inilah yang menjadi semangat yang muncul dari dalam diri kader untuk secara ikhlas berjuang demi kemaslahatan bangsa serta agamanya. Doktrin ini disampaikan melalui *training-training* HMI secara bertahap, dan disampaikan dengan metode-metode yang berbeda.

Doktrin Perjuangan HMI menunjukkan terdapat hubungan konseptual sebagai mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, baik secara akidah, historis, ideologis, dan teknis. Masing-masing doktrin tersebut memiliki kekhasan sendiri sesuai dengan ruang dan waktu. Adapun konvergensi (titik temu) antara doktrin-doktrin perjuangan HMI dengan pelaksanaan upaya lobby HMI kepada Presiden Soekarno terletak pada butir doktrin perjuangan HMI terkait pemikiran ke-Islaman dan ke-Indonesiaan HMI terdapat dua makna dalam isi

kandungannya yakni menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam dalam relevansi ini dipandang dalam konteks aqidah. Makna yang kedua ialah makna ke-Indonesiaan HMI. Disinilah makna keterkaitan doktrin perjuangan HMI dalam relevansi HMI melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno dengan tujuan ikut mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.

Pada Desember 1965, PB HMI menggelar Rapat Pleno di Pasar Minggu, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh Pengurus Besar serta Ketua-Ketua Badan Kordinasi (BADKO) HMI dari seluruh Indonesia. Rapat Pleno ini merupakan momentum strategis bagi HMI dalam merumuskan strategi survivalitas politiknya.

Rapat Pleno berlangsung dengan dinamis. Tuntutan untuk menjatuhkan Bung Karno pun bermunculan. HMI ingin proses peralihan kekuasaan terjadi secara konstitusional. Dalam pandangan Sulastomo, walaupun posisi politik Bung Karno semakin terjepit tetapi ia masih memiliki kekuasaan, termasuk membubarkan partai politik dan ormas. Menurut pandangan HMI bahwa pemerintah yang dalam hal ini Presiden Soekarno, dinilai lamban dalam penyikapan G 30 S/PKI. Selain itu dalam pandangan peserta Rapat Pleno PB HMI, Presiden Soekarno pun tidak tegas dalam sikap politiknya terhadap PKI (Alfan Alfian, 201;241).

Dalam substansi Rapat Pleno tersebut disepakati bahwa demonstrasi turun ke jalan melalui organisasi sayap bentukan HMI

(KAMI) tetap harus dilakukan. Hal ini bertujuan guna menekan pemerintahan dari bawah dengan jumlah massa yang besar dengan konsolidasi organisasi dengan elemen mahasiswa yang lain yang ikut bergabung dalam KAMI. Dalam aksi turun kejalan strategi yang dilakukan HMI tidak dengan menunjukkan nama identitas HMI melainkan membentuk organisasi sayap yakni KAMI yang dibentuk oleh dua anggota Pengurus Besar (PB) HMI yakni Mar'ie Muhammad dan Ekky Syahrudin (Agussalim Sitompul, 2008:49).

Pencapaian HMI dalam melakukan upaya lobby ke puncak panggung politik tidak terlepas dari peran serta tokoh-tokoh senior HMI dalam kabinet. Brigjen Ahmad Tirtosudiro, Dahlan Ranuwihardjo, S.H, serta K.H Saifuddin Zuhri telah berperan besar dalam mengantar dan mengawal HMI dalam pencapaian lobby-lobby politik. Brigjen Ahmad Tirtosudiro merupakan mantan Wakil Ketua PB HMI periode 1947-1951. Ahmad Tirtosudiro juga merupakan seorang Perwira Tinggi Angkatan darat (AD). Hubungan dekat antara Angkatan Darat dengan HMI salah satunya adalah berkat komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh Brigjen Ahmad Tirtosudiro.

Dalam pelaksanaan upaya lobby-lobby politik antara HMI kepada Presiden Soekarno, tokoh senior HMI seperti K.H Saifuddin Zuhri, Drs. Dahlan Ranuwihardjo, serta Kolonel Sucipto, S.H berperan besar dalam mengawal Pengurus Besar HMI dalam pelaksanaan dialog dengan Presiden Soekarno. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya antek-antek PKI yang duduk di

tataran kabinet yang bisa saja mempengaruhi pemikiran Presiden Soekarno. Sedangkan Brigjen Ahmad Tirtosudiro bertugas menjadi jembatan penghubung yang efektif dalam komunikasi antara HMI dengan Angkatan Darat. Hal ini diperlukan guna pengamanan kepada HMI mengingat kebencian serta keinginan PKI untuk membubarkan HMI (Sulastomo, 2006; 37).

Situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu setelah enam jenderal terbunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada 1965, kemudian massa dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia) melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena bertentangan dengan pandangan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme).

Tidak adanya sikap politik Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI dengan alasan kontra-Revolusi serta bertentangan dengan pandangan Nasakom membuat mahasiswa yang tergabung dalam KAMI mulai bergerak offensif. Tiga ribu mahasiswa berkumpul di Universitas Indonesia membentuk organisasi paramiliter yang diberi nama Resimen Arief Rahman Hakim. Hal ini untuk mengenang atas tewasnya Arief Rahman Hakim dalam peristiwa demonstrasi sebelumnya (Agussalim Sitompul, 2008; 70).

Selanjutnya tanggal 10 Maret, KAMI menyerang dan mengobrak abrik Konsulat Jenderal RRC. Tanggal 11 Maret merupakan puncak kerusuhan. Aksi pembakaran serta

penggembesan ban mobil membuat suasana pada waktu itu mencekam. Suasana yang tidak kondusif membuat Presiden Soekarno yang pada waktu itu hadir dalam Rapat Kabinet di Istana pergi menggunakan helikopter menuju Istana Bogor. Delegasi tiga Perwira Tinggi dikirim Soeharto menemui Presiden Soekarno agar memberikan mandat kepada Soeharto selaku Menteri Angkatan Darat untuk mengamankan keadaan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memelihara keamanan, ketertiban, ketenangan dan stabilitas negara.

Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Kemudian MPRS pun mengeluarkan dua Ketetapannya, yaitu TAP No. IX/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TAP MPRS dan TAP No. XV/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar (Agussalim Sitompul, 2008; 73).

Hubungan antara Angkatan Darat dan HMI berlangsung harmonis sejak peristiwa pemberontakan PKI Madiun. Pada Dies Natalis HMI ke- I di Bangsal Agung Kepatihan Yogyakarta Tanggal 6 Februari 1948 dalam sambutannya Jenderal Sudirman mengatakan tidak hanya HMI yang mempunyai singkatan **H**impunan **M**ahasiswa **I**slam, lebih dari itu beliau mengatakan bahwa HMI merupakan **H**arapan **M**asyarakat **I**ndonesia (Agussalim Sitompul, 2008; 23).

Ketika meletusnya pemberontakan PKI Madiun, HMI turut membantu Angkatan Darat

dengan membentuk Corp Mahasiswa (CM). Di samping sebagai kekuatan tempur, Corp Mahasiswa yang terdiri dari berbagai elemen organisasi kemahasiswaan yang tergabung juga bertugas memasang ranjau, intelejen, penerangan, bersama-sama dalam kesatuan Siliwangi dari Jawa Barat.

Pada saat HMI melakukan lobby dengan Presiden Soekarno Angkatan Darat berperan besar dalam pengamanan kepada Pengurus Besar HMI. Selain daripada itu secara terang-terangan Angkatan Darat juga akan berjuang bersama dalam upaya melemahkan dan upaya bersama untuk membubarkan PKI.

Kerjasama sipil-militer antara HMI dengan Angkatan Darat dalam pembubaran PKI merupakan sesuatu yang menarik. Sama-sama sebagai sasaran pengganyangan dan rongrongan PKI serta latar belakang historis saat bersama-sama menumpas PKI Madiun membuat PKI dan HMI kembali bersama dalam pembubaran PKI dari tanah air Indonesia. Dukungan sertadari tokoh-tokoh petinggi Angkatan Darat menjadi semangat serta rasa percaya diri dari HMI dalam melakukan upaya-upaya lobby kepada Presiden Soekarno dalam pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Berdasarkan data pada hasil Doktrin Perjuangan HMI mempunyai peran yang mampu membangkitkan pola pikir kader HMI dalam mencapai arah tujuannya. Selain itu Doktrin Perjuangan HMI juga berperan dalam membentuk militansi kader HMI serta rasa cinta kepada organisasi. Hal inilah yang menjadi semangat yang muncul dari dalam diri kader HMI untuk secara ikhlas berjuang demi kemaslahatan bangsa serta agamanya.

Dalam situasi pasca G 30 S/PKI, tindakan berikutnya yang diambil oleh PB HMI adalah mengundang seluruh Ketua Badan Kordinasi (BADKO) di Indonesia untuk menyatukan gerak langkah dalam rangka strategi dasar, menjaga eksistensi dan konsolidasi organisasi. Rapat ini berupa Rapat Pleno yang diadakan di daerah Pasar Minggu pada Desember 1965. Dalam Rapat Pleno inilah yang menjadi faktor pendorong bagi HMI untuk melakukan upaya lobby-lobby politik kepada Presiden Soekarno dalam membubarkan PKI, selain daripada aksi turun kejalan dengan mengatasnamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Sebagai organisasi yang berdiri pada tahun 1947 tentunya HMI telah banyak mencetak para alumni organisasinya. Sejak Era Demokrasi Terpimpin telah banyak alumni HMI yang duduk dalam kabinet, contohnya K.H Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama, Brigjen Ahmad Tirtosudiro sebagai Menteri Koperasi, Dahlan Ranuwihardjo sebagai Anggota DPR GR serta sebagai Penasehat Kepresidenan, Kolonel Sucipto sebagai Sekretaris Umum Majelis Pembantu Pemimpin Revolusi. Menurut analisa penulis, masuknya alumni HMI di dalam kabinet sebagai keterwakilan dari golongan tokoh Islam, karena pada waktu itu Presiden Soekarno menerapkan NASAKOM.

Pencapaian HMI dalam melakukan lobby ke puncakpanggung politik tidak terlepas dari peran serta tokoh-tokoh senior HMI dalam kabinet. Lebih lanjut menurut T Hani Handoko (2003) mengatakan bahwa dalam organisasi komunikasi menjadi hal yang penting. Komunikasi ini

tepatnya bisa dilakukan dengan anggota, alumni atau senior organisasi yang duduk dalam pemerintahan, maupun masyarakat.

Dukungan yang dilakukan tokoh-tokoh petinggi Angkatan Darat memberikan semangat moril tersendiri bagi HMI dalam melakukan upaya lobby-lobby politik. Kerjasama sipil-militer antara HMI dengan Angkatan Darat dalam pembubaran PKI merupakan suatu hal yang menarik. Sama-sama sebagai sasaran pengganyangan dan rongrongan PKI serta latar belakang historis saat bersama-sama menumpas PKI Madiun membuat Angkatan Darat dan HMI kembali bersama dalam pembubaran PKI.

Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk dimana HMI berspesialisasi. Dilihat dari sudut pandang ideologi antara HMI dan PKI pun berbeda. HMI secara organisatoris berazaskan Islam, sedangkan PKI berazaskan komunis. Latar belakang ideologis inilah yang membuat kedua organisasi ini berseberangan dan bahkan berusaha untuk ingin membubarkan satu sama lain.

HMI sebagai organisasi pembinaan kader untuk mencetak cendekiawan muslim tentunya tidak dikehendaki oleh PKI karena menurut PKI golongan umat Islam adalah golongan yang paling menentang paham komunis untuk berkembang di Indonesia. Selain itu HMI sebagai organisasi mahasiswa juga gigih dalam melakukan upaya melawan PKI semenjak peristiwa pemberontakan PKI Madiun.

Langkah demi langkah PKI melakukan manuvernya untuk membubarkan HMI, yang sebelumnya telah berhasil membubarkan Partai Islam Masyumi

lewat tangan Presiden Soekarno. PKI tentunya sadar, bahwa upaya membubarkan HMI tentulah tidak mudah karena ada kekuatan Angkatan Darat yang mem *backup*. Upaya-upaya PKI dalam membubarkan HMI menjadikan HMI gigih berjuang dan mencari kawan politik dalam upaya membubarkan PKI serta menangkai paham komunisme di Indonesia. Pengganyangan PKI terhadap HMI menjadi motivasi besar HMI untuk membuktikan survivalitas HMI dalam upaya pembubaran PKI melalui upaya lobby politik.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno tentang pembubaran PKI pada tahun 1965 dipengaruhi oleh faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal yang melatarbelakangi HMI melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno yaitu; Doktrin Perjuangan HMI, Rapat Pleno PB HMI, dan Peran Tokoh Senior HMI dalam kabinet. Sedangkan faktor eksternal yang melatarbelakangi HMI melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno yakni; Dukungan tokoh petinggi Angkatan Darat (AD) kepada HMI, Sikap Presiden Soekarno terhadap PKI, dan Upaya-upaya PKI membubarkan HMI.

Doktrin Perjuangan HMI, Rapat Pleno PB HMI, serta keikutsertaan tokoh senior HMI dalam kabinet merupakan faktor-faktor yang muncul di dalam internal organisasi. Selain faktor internal organisasi yang disebutkan diatas, faktor eksternal organisasi juga

mendorong serta mendukung HMI untuk melakukan upaya lobby kepada Presiden Soekarno. Pasca peristiwa G 30 S/PKI Presiden Soekarno belum mengambil sikap untuk membubarkan PKI dengan alasan kontra-revolusi. Hal ini membuat HMI bergerak ofensif. Selain terjun dalam aksi demonstrasi, arah kebijakan selanjutnya yang ditempuh oleh HMI adalah melalui upaya lobby-lobby politik kepada Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI serta menolak paham komunis berkembang di Indonesia.

Selain faktor eksternal tersebut Upaya-upaya PKI untuk membubarkan HMI juga menjadi faktor penting bagi HMI dalam melakukan upaya perlawanan terhadap PKI. Derasnya upaya-upaya PKI untuk membubarkan HMI membuat HMI semakin gigih berjuang dan mencari kawan politik dalam upaya membubarkan PKI serta menangkai paham komunis di Indonesia.

Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dan desakan dari segenap rakyat Indonesia akhirnya atas keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS/PBR No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966, secara resmi PKI dan organisasi massanya dibubarkan serta dilarang diseluruh wilayah NKRI. Disinilah relevansi pelarangan Ideologi Komunis, Marxisme/Leninisme oleh MPRS, oleh karena komunis adalah ideologi yang membuka jalan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian M Alfian. 2013. *HMI 1963-1966 Menegakkan Pancasila Ditengah Prahara*. Jakarta : Penerbit Kompas

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : RINEKA CIPTA
- Mortimer, Rex. 2011. *Indonesian Communism Under Soekarno, Ideologi dan Politik 1959-196* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sitompul, Agus. 2008. *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta : Penerbit CV Misaka Galiza
- _____, Agus. 2008. *Sejarah HMI 1947-1975*. Jakarta : Penerbit CV Misaka Galiza
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : RINEKA CIPTA
- Sulastomo. 2006. *Dibalik tragedi 1965*. Jakarta : P.T Intermasa
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit Rajawali